



# REVITALISASI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI UPAYA MENGELIMINIR DAMPAK *PROXY WAR* DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Oleh : Mayjen TNI Arif Rahman, M.A

### Abstraksi

Dengan terbatasnya sumber daya alam, terutama yang berupa pangan, energi dan air maka membuat negara-negara besar melakukan eksploitasi terhadap negara miskin dan berkembang yang potensial. Untuk mewujudkan motif penguasaan sumber daya alam dan pangsa pasar tersebut salah satu metode yang dilakukan adalah dengan melaksanakan *Proxy War*. Indonesia, sebagai salah satu negara yang kaya sumber daya alam dan berada di ekuator harus waspada terhadap ancaman *Proxy War* tersebut, dimana salah satu upaya yang bisa dilaksanakan adalah dengan melaksanakan revitalisasi kearifan lokal yang dimilikinya. Sebagai negara dengan sistem sosial yang *Pluralistic Society* (masyarakat majemuk), Indonesia kaya akan kearifan lokal. Kearifan lokal yang sudah terbukti mampu menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa ini apabila diimplementasikan dengan ilmu dan teknologi yang tepat serta diterapkan pada aspek kehidupan yang tepat akan mampu menjadi penangkal bahaya *proxy war* yang mengancam kehidupan bangsa.

**Kata Kunci:** Kearifan lokal yang sudah terbukti mampu menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa

### Abstract

*Limitation of natural resources, such as food, mineral energy and water makes the develop coutry to explored and exploit the potential developing and under developed country. Proxy war is one of the method to be able to dominate and control the natural resources and market share of the developing and under developed country. Indonesia as one of country who has avery rich of natural resources and its located on the equator should aware and alert to the threat of proxy war. Indonesia who has pluralistic society system who has a lot of local wisdom should be revitalized to encounter the proxy war. When local wisdom which has been proved to maintain the harmony of people life is implemented with the right and proper science and technology to the aspect of life will be able to encounter the danger of proxy war that threat the life of people.*

**Keywords:** *Local wisdom that has been proven to maintain the harmony of life of the nation*



## Pendahuluan

**“Ci Vis Pacem Parabellum,”** Jika anda mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang idiom kuno itu terdapat dalam kata pengantar buku *De re Militari*, karangan penulis militer Romawi Publius Flavius Vegetius Renatus pada tahun 400 Masehi. Sebuah idiom kuno yang sampai sekarang masih relevan dalam konteks ketahanan suatu bangsa. Suatu bangsa yang menginginkan perdamaian dan kesejahteraan, maka bangsa itu harus membangun ketahanan yang kuat, baik dibidang militer maupun komponen pendukungnya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perang, maka metode perang juga mengalami perubahan. Ditemukannya berbagai Alutsista baru dan komponen-komponen pendukung peperangan serta teknologi yang semakin canggih termasuk didalamnya *Revolution Military Affairs* (RMA) membuat perang yang awalnya sangat bergantung pada *Man Power* perlahan bergeser pada penguasaan informasi, *network-centric warfare* dan komando pengendalian operasi yang berbasis teknologi informasi<sup>1</sup>. Konsep pertahanan suatu bangsa salah satunya disusun berdasarkan hakekat ancaman yang mungkin timbul. Ancaman global yang mengancam kelangsungan hidup seluruh bangsa di dunia adalah keterbatasan sumber energi, pangan dan air dibandingkan pertumbuhan penduduk dunia yang makin banyak.

Dalam perspektif sistem sosial, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (*pluralistic society*), dimana secara horizontal kita terdiri atas berbagai SARA (Suku, Agama, Ras dan antar golongan) serta secara vertikal kita terdiri atas berbagai

tingkatan strata sosial, ekonomi pendidikan dan lain-lain. Sistem masyarakat majemuk ini juga sangat kaya akan berbagai budaya daerah yang berupa hasil olah pikir serta kebijaksanaan serta kearifan lokal yang bernilai tinggi. Kearifan dan kebijaksanaan lokal ini terbukti mampu menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa ini apabila diimplementasikan dengan ilmu dan teknologi yang tepat akan mampu menjadi penangkal bahaya *proxy war* yang mengancam kehidupan bangsa.

### **Proxy War dan disintegrasi bangsa.**

**Proxy war** adalah perang yang dilaksanakan tidak secara terbuka, di mana salah satu pihak memanfaatkan pihak ketiga untuk mengalahkan musuh menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. *Proxy war* biasanya dilaksanakan oleh suatu negara besar dengan menggunakan aktor non negara (*non state actors*) dan aktor negara (*state actors*)<sup>2</sup>.

Dalam prakteknya *proxy war* tersebut dilakukan dengan pendekatan dalam bentuk *soft power* atau *hard power*. (*Jurnal Unhan-jurnal.idu.ac.id*). Pendekatan *Soft power* menggunakan perangkat ekonomi (*Economy Power*) dan kecanggihan perangkat teknologi dan informasi. Perangkat ekonomi ini dalam bentuk bantuan dari negara besar atau lembaga internasional kepada negara yang diincarnya. Mereka menyalurkan dana dari lembaga keuangan dunia dan organisasi bantuan luar negeri yang pada akhirnya menjadi jerat penguasaan sumber daya negara tersebut. Beberapa isu yang diusung dalam upaya tersebut biasanya berkaitan dengan demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup untuk melegalkan tindakan-tindakannya. Ada

<sup>1</sup> Ahmad Jay, RMA, 2017, <https://dictio.id>.

<sup>2</sup> Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/rulimustafa/5a264835756db50f6829c1a2/memahami-proxy-war>, 5 Desember 2017

suatu kekuatan besar yang bekerja di beberapa negara miskin dan negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta pangsa pasar yang besar untuk dieksploitasi negara *super power*.

Pendekatan kedua adalah *hard power*, hal ini dilakukan dengan melakukan intervensi oleh negara-negara yang mapan secara ekonomi, politik dan militer kepada negara miskin dan berkembang yang menghalangi kepentingan nasionalnya. Intervensi tersebut dilakukan dengan kekuatan militer dan langkah-langkah politik. (EsDifferent, <https://id.esdifferent.com/difference-between-hard-power-and-soft-power> 7 Mei 2018). Langkah-langkah politik ini dilakukan dengan berbagai sanksi internasional. Negara-negara maju sudah memberlakukan berbagai standar internasional yang harus diikuti oleh negara miskin dan berkembang contoh MDG (*Millenium Development Goals*), *Civil Society*, *Civil Supremacy*, *Human Rights*, *Climate Change*, *Transparency*, *Accountability* dan lain sebagainya. Seperangkat standarisasi dan regulasi ini tidak dapat ditolak karena merupakan isu penting dalam politik internasional. Dengan kata lain, *proxy war* artinya perang tidak tampak, menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga.

Beberapa hal yang merupakan dampak *Proxy War* dalam konteks integrasi bangsa antara lain sikap intoleransi terhadap kemajemukan bangsa, hilangnya semangat musyawarah mufakat dan mengedepankan politik identitas dan maraknya pengerahan massa sebagai upaya intimidasi terhadap kelompok lain serta adanya sikap apriori terhadap kebijakan pemerintah.

Hal lain yang menjadi faktor penghambat integrasi dan menjadi fenomena sosial di

beberapa daerah sebagai dampak *Proxy War* adalah berkembangnya paham kedaerahan, berkembangnya paham stratifikasi sosial atau kelompok, berkembangnya anggapan bahwa agama dan kepercayaan tertentu yang paling benar serta berkembangnya anggapan bahwa kebudayaan tertentu yang paling tinggi. Istilah Integrasi mengandung makna saling ketergantungan dan hubungan antar bagian dalam sistem sosial masyarakat sehingga tercapai harmonisasi dan mencegah disintegrasi.

Gejala awal disintegrasi atau disorganisasi sosial yaitu tidak ada persamaan pandangan (persepsi) antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan pegangan oleh setiap anggota masyarakat. Selain itu, norma-norma masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai alat pengendali sosial untuk mencapai tujuan masyarakat sehingga terjadi pertentangan antara norma yang ada didalam masyarakat. Gesekan antar elemen bangsa serta disharmoni pada bidang politik terutama menjelang dan paska pelaksanaan Pilkada dan Pilpres merupakan celah yang bisa dimanfaatkan pihak luar untuk sarana *Proxy War* dalam menciptakan terjadinya disintegrasi di tengah pluralisme bangsa.

Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia yang membentang dari Sabang sampai Merauke sejauh 8.514 Km dan dari Miangas sampai Pulau Rote sejauh 1.851 Km. Menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2004, Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.504 buah di antaranya 16.506 pulau telah mempunyai nama dan 998 pulau belum mempunyai nama<sup>3</sup>. Luasnya wilayah dan banyaknya suku bangsa berdampak

<sup>3</sup> Trubus, <https://news.trubus.id/post/jumlah-pulau-di-indonesia-17504-bukan-16506-1073>, 21 Agustus 2017



pada keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh setiap daerah. Dalam sistem sosial masyarakat Indonesia adalah *pluralistic society* (masyarakat majemuk) yang secara vertikal dan horizontal terdiri atas berbagai *heterogenitas*. Salah satu ciri masyarakat majemuk adalah rawan terhadap konflik antar kelompok. Hal ini juga menjadi celah bagi pihak luar untuk memanfaatkan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan sebagai agen-agen *Proxy War* yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

### **Perlunya Kontra *Proxy War* untuk menjaga integrasi bangsa**

Perjalanan kemerdekaan yang sudah memasuki usia 72 tahun ini, masih menyisakan beragam persoalan dalam kemajemukan yang intensitasnya kian membesar. Konflik yang diharapkan bisa selesai dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ternyata belum sepenuhnya terwujud.

Kekerasan menjadi pilihan sebagian masyarakat dalam menyelesaikan perbedaan. Konflik horizontal yang dipicu persoalan politik, ekonomi, agama, arogansi ormas, bahkan pertandingan sepak bola sering kali diselesaikan dengan kekerasan. Bila dilihat pada konflik dan perang yang terjadi di berbagai Negara yang disebabkan *proxy war*, semua disertai dengan revolusi sosial. Dimana muncul kekuatan rakyat yang diprovokasi untuk menentang pemerintahan yang sah.

Revolusi sosial secara meluas belum pernah terjadi di Indonesia, karena kita mempunyai kultur yang beraneka ragam sehingga sulit dipersatukan sebagai kekuatan sosial dan politik untuk tujuan tertentu. Hal ini merupakan kelemahan sekaligus kekuatan karena akan sulit untuk dipengaruhi oleh pandangan luar dalam waktu singkat. Kita mempunyai pengalaman

pahit dalam konflik komunal dimana pernah terjadi berbagai benturan antar etnis dan budaya paska reformasi. Peristiwa konflik bernuansa SARA yang terjadi di wilayah Kalimantan, yaitu di Sanggau Ledo, Sambas dan Sampit, kerusuhan Ambon, Poso dan Aceh serta beberapa wilayah lain merupakan ancaman disintegrasi.

Menghadapi motif dalam memaksakan kepentingan nasional yang dilakukan oleh negara maju maka diperlukan tindakan strategis ke dalam yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Nasionalisme dan patriotisme merupakan kata kunci untuk menanamkan kontra *proxy*. Nasionalisme ini tidak hanya dikaitkan dengan kekuatan militer namun lebih kepada nilai-nilai luhur warisan nenek moyang yang dapat memadukan keragaman dalam satu persatuan, termasuk didalamnya kearifan lokal.

### **Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai upaya kontra *Proxy War***

Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Revitalisasi juga berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Sedangkan kearifan lokal adalah seperangkat pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang diperoleh dari generasi sebelumnya atau pengalaman yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat, baik tentang nilai-nilai yang sarat kearifan, cara pandang, maupun cara bersikap untuk menyelesaikan berbagai masalah yang di hadapi<sup>4</sup>. Kearifan lokal yang ada di Indonesia mengandung

<sup>4</sup> Kajian Pustaka, <https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-fungsi-dimensi-kearifan-lokal.html>, 17 September 2017

nilai-nilai luhur dimana merupakan pedoman yang dipegang nenek moyang kita dalam berinteraksi sosial. Di setiap daerah di Indonesia mempunyai kearifan lokal masing-masing dimana apabila kearifan lokal tersebut di pegang teguh maka dapat menjadi penangkal terhadap masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Upaya untuk menghidupkan kearifan lokal juga bisa menjadi tameng sosial dalam mengantisipasi dampak *proxy war*. Beberapa kearifan lokal yang dimiliki Indonesia antara lain: suku Jawa terkenal dengan tata krama dan perilaku yang lemah lembut, etnis Madura memiliki etos kerja yang tinggi dan pantang menyerah, etnis bugis memiliki harga diri yang tinggi dan senantiasa menjaga kehormatannya, etnis Batak dikenal terbuka dan mudah beradaptasi, etnis Cina dikenal dengan keuletannya dalam berusaha dan kemampuan manajemen yang baik, suku Aceh dikenal dengan ketaatannya dalam menjalankan ajaran agama islam, suku Sunda dikenal dengan keramah tamahan dan berjiwa kreatif dan lain-lain. Beberapa nilai, norma, hukum adat yang ada di masyarakat tradisional indonesia banyak yang masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern.

Secara umum kearifan lokal yang ada di berbagai wilayah di Indonesia memiliki beberapa ciri-ciri: mempunyai kemampuan mengendalikan, merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya, mempunyai kemampuan mengintegrasikan atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. (Firman Akbar, Ciri-ciri kearifan lokal, 2010). Kearifan Lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari

periode yang panjang dan berevolusi bersama dengan masyarakat dan lingkungan di daerahnya berdasarkan apa yang sudah dialami. Jadi dapat dikatakan, kearifan lokal di setiap daerah berbeda-beda tergantung lingkungan dan kebutuhan hidup<sup>5</sup>. Potensi kearifan lokal Indonesia ini adalah warisan berharga yang apabila digali, diseleksi dan digabungkan akan menjadi modal bangsa yang sangat bernilai dalam melindungi integrasi dan kepentingan nasional dari ancaman luar.

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengeliminir dampak *proxy war* dengan melestarikan kearifan lokal antara lain;

### **Pertama, Menjadikan kembali kearifan Lokal sebagai Identitas Bangsa.**

Dalam era globalisasi saat ini banyak budaya global yang sebelumnya adalah kearifan lokal suatu bangsa yang diterima oleh masyarakat internasional dan bahkan kadang-kadang menggeser budaya serta kearifan lokal di negara tersebut. Sebagai contoh, hampir semua masyarakat di negara Asia Tenggara mengenal baik lagu-lagu India yang sedang hits, hal ini karena India berhasil merevitalisasi kearifan lokal di negaranya dan mampu menjadikan lagu-lagu India yang berisi kearifan lokalnya diterima negara lain.

Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang mewujudkan dalam berbagai bidang kehidupan (tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan dan sebagainya). Sebagai contoh, kearifan lokal yang bertumpu pada

<sup>5</sup> Infokekinian, <https://www.infokekinian.com/pengertian-dan-contoh-kearifan-lokal/>, 1 Maret 2017

keselarasan alam telah menghasilkan pendopo dalam arsitektur Jawa. Pendopo dengan konsep ruang terbuka menjamin ventilasi dan sirkulasi udara yang lancar tanpa perlu penyejuk udara. Pendopo adalah salah satu contoh bagaimana kearifan lokal warisan masa lampau telah memberikan kepada kita konsep arsitektur yang lega, nyaman dan hemat energi. Sekarang ini, kita mempersoalkan krisis energi dan menyerukan hemat energi. Namun, gedung dan rumah dibangun dengan konsep bangunan tertutup sehingga memerlukan penyejuk udara yang boros energi<sup>6</sup>.

Konsep pendopo ini telah ditemukan oleh bangsa Indonesia khususnya masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak zaman dahulu kala jauh sebelum adanya konsep *ecodesign* dalam ilmu arsitektur modern.

Kearifan lokal lain yang sangat relevan diterapkan dalam era *Proxy War* ini adalah budaya gotong royong. Di masyarakat pedesaan sampai saat ini gotong royong masih sering dilaksanakan, terutama dalam menjaga kepentingan bersama seperti membangun balai desa, membersihkan jalan desa, pembangunan masjid atau mushola dan lain-lain.

Di Muara Enim, Sumatera Selatan ada budaya yang disebut "*bebie*" yang merupakan tradisi masyarakat setempat dalam menanam dan memanen padi secara bersama-sama dengan tujuan agar kegiatan menanam dan memanen dengan alat tradisional tersebut cepat selesai, dimana setelah panen padi selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan pesta bersama sebagai

bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kearifan lokal gotong royong yang telah dilaksanakan selama ratusan tahun tersebut mengandung filosofi yang sangat tinggi, baik dilihat dari segi selesainya pekerjaan maupun dilihat dari sisi komunikasi sosial, interaksi sosial dan rasa persatuan yang sangat diperlukan dalam mengeliminir dampak *Proxy War*. Berbagai kearifan lokal yang bernilai luhur tersebut seharusnya menjadi identitas nasional kita.

#### **Kedua, Menerapkan filosofi kearifan lokal dalam berbagai aspek sosial.**

Seperti diuraikan diatas, hampir di seluruh wilayah Propinsi Indonesia memiliki kearifan lokal yang secara turun temurun diyakini keluhurannya, tetapi karena pengaruh globalisasi sebagian kearifan lokal tersebut hanya dipandang sebagai pusaka warisan yang tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari serta tidak dihayati nilai filosofi yang terkandung didalamnya. Kearifan lokal yang berupa karya seni seperti tembang-tembang mocapat di Jawa tengah berisi ujaran-ujaran luhur dalam kehidupan. Banyak seniman-seniman yang melestarikan tembang-tembang tersebut, bahkan pemerintah juga cukup giat melestarikannya melalui lembaga-lembaga kesenian yang ada. Tetapi masih sangat sedikit yang memahami isi filosofi dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga kearifan lokal yang berupa syair-syair, cerita rakyat dan seni drama yang berada di berbagai daerah umumnya hanya dipandang sebagai pusaka warisan leluhur saja, tanpa upaya untuk memahami lebih dalam nilai filosofi yang ada didalamnya maupun untuk mempraktekkannya sesuai konteks dalam kearifan lokal tersebut.

Sikap yang memandang kearifan lokal hanya sebagai pusaka warisan, ini rentan terhadap gempuran globalisasi yang

---

<sup>6</sup> Suyono Suyatno, Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan, 2013



semakin hari semakin gencar terutama lewat media sosial. Sehingga tidak menutup kemungkinan kearifan lokal akan semakin lapuk dan ditinggalkan generasi selanjutnya. Kearifan lokal yang luhur kadang-kadang juga tergerus oleh kebutuhan ekonomi dan sikap apatis masyarakat terhadap peraturan yang ada. Sebagai contoh, selama berpuluh-puluh tahun masyarakat disekitar hutan perhutani di Jawa Tengah dan Jawa Timur, baik hutan lindung maupun hutan produksi ikut menjaga keamanan hutan negara sebagai warisan sikap “melu handarbeni, wani hangrungkebi” (Ikut merasa memiliki dan berani ikut membela). Tetapi paska reformasi terjadi disorientasi nilai-nilai sosial sehingga banyak terjadi penjarahan di hutan-hutan Perhutani.

Kearifan lokal Indonesia akan dapat terus dilestarikan apabila kearifan lokal tersebut diterapkan dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari dalam konteks yang tepat. Kearifan lokal ini juga seharusnya dilembagakan dengan dipraktekkan dalam praktek-praktek politik tingkat nasional. Contoh, penyusunan rencana kebijakan ekonomi bangsa yang merefleksikan semangat keadilan dan gotong royong, mengedepankan semangat musyawarah dalam pengambilan keputusan di tingkat lembaga tinggi Negara, sikap kedewasaan dalam tahapan pilkada serta menghargai pihak yang kalah (filosofi “*nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake*”) dan lain-lain.

Salah satu masalah utama bangsa saat ini adalah maraknya korupsi, sampai dengan tahun 2018 ini sudah ratusan kepala daerah yang ditangkap oleh KPK berkaitan dengan korupsi. Meskipun sudah banyak kepala daerah maupun pejabat negara yang ditangkap dan dijatuhi hukuman berat, tetapi fenomena tindak korupsi ini tidak menunjukkan tanda-tanda menurun. Dalam konteks

kearifan lokal terdapat idiom Jawa yang sangat terkenal, yaitu “*Ing Ngarsa Sung Tuladha*”, yang artinya setiap pemimpin harus dapat menjadi teladan atau di Sulawesi Selatan terkenal budaya “*Siri*”, yaitu budaya malu bila berbuat salah. Kearifan lokal tersebut sekarang mulai susah dijumpai di tataran pemimpin bangsa. Kearifan lokal di banyak daerah pada umumnya mengajarkan budaya malu jika melakukan suatu kesalahan sosial. Akan tetapi, kenyataan saat ini budaya malu itu telah luntur. Peraturan yang ada pun kadang-kadang memberi peluang kepada seorang terpidana atau bekas terpidana untuk menduduki jabatan publik tanpa memperhatikan etika publik. Kearifan lokal merasa malu/budaya malu semestinya dapat direvitalisasi untuk memerangi korupsi maupun disorientasi masyarakat terhadap etika sosial.

Kita masih bersyukur, ditengah gempuran globalisasi seperti maraknya *franchise* kuliner asing di setiap kota di Indonesia, masih kita dapati kearifan lokal dibidang kuliner yang bernuansa kearifan lokal, seperti rumah makan padang, rumah makan khas sunda, rumah makan gudeg Yogya dan lain-lain yang semuanya itu harus kita lestarikan. Demikian juga di bidang industri farmasi, jamu sebagai warisan nenek moyang kita yang terbukti mempunyai efek samping lebih kecil dibandingkan obat kimia sudah mulai menunjukkan eksistensi yang lebih baik dalam pasar farmasi dalam negeri.

Sementara itu, gotong royong sebagai wujud kearifan lokal kita tampaknya belum sepenuhnya terimplementasikan dalam perekonomian nasional yang masih didominasi kelompok ekonomi kuat yang mempunyai jaringan luas di segala bidang. Perekonomian nasional yang berpijak dan tumbuh dari rakyat setidaknya mencerminkan

kan identitas dan nasionalisme kita. Ketergantungan ekonomi pada asing akan menyebabkan kita dengan mudah didikte oleh kekuatan ekonomi dan politik asing dan hal itu akan mencederai kedaulatan kita sebagai bangsa. (Suyono Suyatno, Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan, 2013).

**Ketiga, Pengintegrasian budaya daerah dalam kehidupan warga negara.**

Sebagai dampak globalisasi, dewasa ini banyak generasi muda yang sudah tidak mengenal budaya daerah masing-masing. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya asing yang masuk seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan maraknya serbuan budaya asing dalam setiap aspek kehidupan. Untuk itu pemerintah harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman generasi muda tentang budaya daerah termasuk didalamnya berbagai kearifan lokal yang sudah dipraktekkan nenek moyang kita. Hal ini bukan tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk melestarikan budaya daerah dan kearifan lokal yang ada di wilayahnya. Dalam lingkup yang paling kecil pendidikan keluarga merupakan pondasi awal untuk memperkenalkan kearifan lokal kepada anak-anak. Hal ini penting untuk mengeliminir penetrasi budaya asing yang saat ini merambah lingkungan keluarga melalui media sosial.

Pengenalan budaya daerah ini bisa dilaksanakan dengan *Culture Experience* dan *Culture Knowledge*. (Yanuar Bagas Arwansyah, Revitalisasi Peran Budaya Lokal dalam pembelajaran BIPA, 2017). *Culture experience* adalah dengan cara secara langsung merasakan sebagai pelaku budaya dan bukan hanya sekedar sebagai penonton budaya di wilayahnya. Sebagai contoh, bila kita berasal dari suku Aceh,

maka kita bisa mencarikan waktu untuk anak-anak belajar tari Saman saat liburan, kalau kita berasal dari suku Sunda, paling tidak anak-anak kita memiliki anglung dan secara terbatas bisa memainkannya, bila kita berasal dari suku Jawa, beri pengalaman anak-anak kita magang di sanggar seni untuk bermain Ketoprak atau wayang orang dan lain-lain. Hal ini penting untuk dipelajari dari generasi ke generasi agar tetap lestari sehingga kita dapat memperkenalkan sekaligus mempromosikan budaya dan kearifan lokal kita kepada dunia internasional. Kita juga bisa mempromosikan budaya kita dengan memposting kegiatan seni lokal di media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *twitter* dan lain-lain. Peningkatan *culture Knowledge* dilakukan dengan membuat pusat informasi kebudayaan masing-masing, sehingga setiap orang dapat dengan mudah untuk menemukan informasi tentang suatu kebudayaan suatu daerah. Di era modern sekarang ini situs *website* dapat menjadi alternatif yang mudah untuk dijadikan sarana menyediakan segala sumber informasi tersebut. Menggunakan produk lokal dan mengeksport barang hasil kesenian budaya lokal juga merupakan cara untuk menjaga budaya Indonesia supaya tidak diakui oleh negara lain. Mari kita mulai menanamkan kecintaan terhadap budaya Indonesia dan memperkenalkan kepada dunia, bahwa budaya Indonesia sangat indah dan tidak kalah dari budaya asing.

**Keempat, menciptakan kearifan lokal kekinian.** Kearifan lokal adalah hasil olah pikir dan olah rasa asli tanah air yang diciptakan dengan memperhatikan norma-norma sosial serta ajaran luhur yang menjadi filosofi suatu kelompok masyarakat. Ada kalanya kearifan lokal juga lahir dari suatu tantangan budaya dan tantangan sosial yang sedang terjadi. Ini berarti bahwa

kelompok masyarakat yang ada di suatu masa dapat menciptakan kearifan lokalnya sendiri dalam menghadapi suatu tantangan sosial. Suatu hasil olah pikir atau olah rasa sosial yang sudah diterima oleh sebagian besar masyarakat dan terbukti efektif dalam membangun kepekaan sosial dan pranata sosial bisa dikategorikan kearifan lokal. Tentu saja dalam era globalisasi ini, bentuk kearifan yang dibangun dilandasi keilmuan dan metodologi yang baik. Sebagai contoh, untuk membangun sinergitas antar aparat pemerintahan dan menjamin lancarnya laju roda pemerintahan wilayah di Propinsi Jawa Timur dikenal istilah “Tiga pilar Plus”. Tiga Pilar Plus merupakan konsep pemerintahan yang digagas oleh gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo. Konsep ini terbukti sangat efektif memadukan kinerja pemerintah daerah, TNI/Polri, DPRD/Parpol dan ditambah tokoh agama serta tokoh masyarakat. Sebenarnya di propinsi lain juga dikenal istilah Forkopimda yang memadukan kinerja instansi pemerintahan di daerah, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat (1), berbunyi Untuk Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Bentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan<sup>7</sup>. Yang membedakan dengan Propinsi Jawa Timur adalah bahwa kerjasama antara instansi pemerintahan dilaksanakan secara intensif dan difasilitasi secara optimal oleh pemerintah daerah. Konsep Tiga Pilar Plus ini dimulai pada tataran tingkat desa, yaitu Kepala Desa/Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Berbagai permasalahan yang terjadi di desa sedapat mungkin diselesaikan pada tataran desa dengan sinergitas tiga

pilar plus yang ada di desa tersebut. Bahkan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan publik yang menjadi tugas dari SKPD Pemda dan instansi vertikal yang ada di Jawa Timur seringkali bisa diselesaikan dengan baik berkat kerjasama dengan tiga pilar yang ada di desa tersebut.

Demikian juga di tingkat kecamatan, dalam hal ini Camat, Danramil dan Kapolsek plus tokoh agama dan tokoh masyarakat senantiasa bekerja bersama bahu membahu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Pada tataran yang lebih tinggi yaitu Kabupaten dan Propinsi sinergitas ini terasa lebih erat karena tingginya intensitas berbagai permasalahan strategis yang dipecahkan bersama. Kepedulian Tiga Pilar tingkat Propinsi sangat dirasakan oleh Tiga Pilar pada tataran dibawahnya dengan seringnya dilaksanakan apel tiga pilar tingkat Kabupaten se Jawa Timur, apel Tiga Pilar tingkat kecamatan se Jawa Timur bahkan apel Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas se Propinsi, suatu hal yang tidak pernah terjadi di Propinsi lain. Dalam perspektif ilmu administrasi *public*, konsep tiga pilar ini merupakan salah satu perwujudan dari *New Public Service* (NPS), dimana salah satu cirinya adalah *serving rather than steering*, peran penting yang berkembang dalam pelayanan publik adalah untuk membantu masyarakat dalam mengartikan atau memahami kepentingan mereka. Ciri lain dari *New Public Services* ini adalah pemerintah yang terus menerus mengenali kebutuhan masyarakat (*the public interest is the aim, not the by-product*) semboyan *citizens first* menjadi semboyan pemerintah. (*The New Public Service, Serving Not Steering*, Janet V Dernhart and Robert B.Dernhardt, 2003). Beberapa bidang pembangunan yang sukses serta menunjukkan hasil signifikan dari penerapan

<sup>7</sup> Kemlu, <http://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>, 7 Mei 2018



konsep Tiga Pilar Plus ini adalah dalam hal pencegahan dan pemberantasan kejahatan, rehabilitasi/rekonstruksi paska bencana di Gunung Kelud, Pacitan dan daerah lain, bidang ketahanan pangan, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Keluarga Berencana/KB dan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Dengan dilibatkannya instansi TNI/Polri dan masyarakat dalam pemecahan masalah juga menunjukkan ciri pelayanan publik yang rasional, proposional dan kolaboratif antara kepemimpinan internal dan eksternal. Dasar motivasi yang menggerakkan dalam pelayanan ini semangat melakukan sesuatu untuk masyarakat. Konsep Tiga Pilar Propinsi Jatim saat ini sudah dikenal di tataran nasional, bahkan dalam suatu kesempatan Menko Polhukam Wiranto menyatakan bahwa dirinya akan mengadopsi Tiga Pilar plus yang ada di Jawa Timur sebagai model tata pemerintahan yang efektif. Karena konsep ini terbukti mampu mengoptimalkan pembangunan dan menurunkan angka kriminalitas dan membuat situasi kondusif Jawa Timur.

Dalam beberapa kesempatan Gubernur Jawa Timur juga diminta untuk memaparkan konsep Tiga Pilar Plus ini di beberapa kementerian dan lembaga termasuk kepada Perwira Siswa/Pasis Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.

Kearifan lokal lainnya di bidang pemerintahan yang efektif untuk menangkal *Proxy War* yang ada di Jawa Timur adalah adanya budaya “Cangkruan”. Cangkruan (kongkow atau mengobrol di warung kopi) sambil membahas suatu permasalahan. Melalui budaya Cangkruan, setiap warga negara di Jawa Timur bisa mengidentifikasi diri secara netral, tanpa ada

kekhawatiran diskriminatif dan ketidakadilan sosial. (Listyono santoso, *The Ethnografi of coffee shop, Identity politics of “cangkruan” in the city of Surabaya and Sidoarjo*, 2017). Menurut penelitian, Cangkruan menjadi wahana komunikasi, sosialisasi dan pusat informasi. Pemerintah Daerah mengadopsi dan merevitalisasi budaya cangkruan ini, yang konsepnya dikemas dengan lebih modern untuk memecahkan berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat. Berbagai isu yang berkembang dan berbagai kesalah pahaman antar kelompok seringkali selesai dengan metode cangkruan ini, karena dalam konteks cangkruan, setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya dalam koridor kesopanan dan etika yang berlaku.

Salah satu metode melaksanakan *Proxy War* adalah dengan menyebarkan *hoaks*. Wahana “cangkruan” ini juga efektif untuk menangkal *hoaks*, karena dengan adanya komunikasi antar elemen masyarakat maka bisa dilaksanakan saling menukar informasi dalam rangka verifikasi berita yang berkembang dimasyarakat maupun di tataran nasional. Karena upaya untuk menangkal *hoaks* adalah melakukan literasi informasi (kemampuan untuk mengidentifikasi dan secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk isu atau masalah yang dihadapi) serta kurasi Informasi/mengecek kebenaran berita kepada pihak yang berkompeten. (Joko Susilo PhD, *Pilkada Zaman Now dan tantangan fundamentalnya*, 2018). Dua hal tersebut hanyalah contoh bagaimana kearifan lokal bisa diciptakan ataupun dimodifikasi sesuai masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Tentunya di daerah lain juga banyak potensi kearifan lokal yang bisa digali untuk mempererat integrasi elemen bangsa dalam rangka melawan dampak *Proxy War*.

## Penutup

Dalam era globalisasi, ketersediaan pangan, energi, air menjadi isu sentral dalam perebutan pengaruh dan hegemoni negara-negara maju terhadap negara berkembang. Peperangan kedepan adalah peperangan memperebutkan sumber daya alam yang makin terbatas. Kita menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sebagai salah satu negara ekuator, kita memiliki potensi vegetasi yang sangat beragam dan sinar matahari sepanjang tahun yang sangat mendukung produktifitas pertanian untuk mendukung ketersediaan pangan. Berbagai potensi bangsa tersebut bisa memberikan dampak positif maupun negative untuk kelangsungan hidup bangsa. Dampak positifnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang kita miliki untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi di satu sisi dengan sumber daya yang melimpah tersebut juga menjadi incaran bangsa-bangsa lain untuk menguasainya.

Dalam era globalisasi ini perang konvensional yang berupa invasi militer ke suatu wilayah negara lain kemungkinannya sangat kecil, kecuali apabila terjadi pertentangan kepentingan nasional yang sangat prinsip. Dengan adanya tuntutan HAM, demokratisasi dan aturan hukum internasional mendorong negara-negara maju menggunakan jenis perang yang lebih mengedepankan *soft power* seperti perang *asimetris*, perang *hibrida* dan perang *proxy*. Indikasi adanya perang *proxy* diantaranya adalah gerakan separatis, demonstrasi massa dan bentrok antar kelompok dan juga dapat dilihat melalui berbagai bentuk pemberitaan media yang provokatif, peredaran, penyebaran pornografi serta

seks bebas. Perang *proxy* atau *proxy war* merupakan ancaman yang sangat besar bagi bangsa dan negara Indonesia.

Dalam menjaga keutuhan bangsa tersebut maka Indonesia perlu melakukan upaya-upaya strategis melawan politik *proxy*, dimana hal ini harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa secara gradual, dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan bahaya *proxy war* yang mengancam bangsa, meningkatkan jiwa persatuan dalam masyarakat yang majemuk, menumbuhkan rasa saling percaya sesama anak bangsa dan pada akhirnya bekerja keras sesuai bidang masing-masing.

Salah satu cara untuk menangkal dampak *proxy war* adalah dengan melaksanakan revitalisasi kearifan lokal kita. Kearifan lokal merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak sehari-hari secara turun temurun. Kearifan lokal juga berarti kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya daerahnya.

Potensi kearifan lokal Indonesia ini adalah warisan berharga yang apabila digali, diseleksi dan digabungkan akan menjadi modal bangsa yang sangat bernilai dalam melindungi integrasi dan kepentingan nasional dari ancaman luar. Upaya revitalisasi kearifan lokal ini meliputi :

*Pertama*, menjadikan kearifan lokal sebagai identitas bangsa, *Kedua*, menerapkan filosofi kearifan lokal dalam berbagai aspek sosial, *Ketiga*, pengintegrasian budaya daerah dalam kehidupan warga negara, *Keempat*, menciptakan kearifan lokal kekinian. Keseluruhan langkah tersebut apabila dilakukan secara simultan akan melahirkan revitalisasi kearifan lokal yang mampu menangkal dampak *Proxy War*

yang mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Demikian sekedar buah pikir penulis semoga bisa menjadi bagian dari solusi dalam mewujudkan cita-cita kita bersama dalam menangkal dampak *Proxy War* dengan mengoptimalkan sumber daya sosial kita yang berupa kearifan lokal.

### Daftar Pustaka

#### Buku-buku

Drs. Abdul Syani, M.IP. Kearifan Lokal Sebagai Aset Budaya Bangsa Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat, 2003;

Firman Akbar, Pengertian dan Contoh Kearifan Lokal, 2017;

Firman Akbar, Ciri Kearifan lokal, 2010;

Joko Susilo PhD, Pilkada Zaman Now dan tantangan fundamentalnya, 2018;

Janet V Dernhart and Robert B. Dernhardt, The New Public Service, Serving Not Steering, 2003;

Listyono Santoso, The Etnografi of coffee shop, Identity politics of “cangkruan” in the city of Surabaya and Sidoarjo, 2017;

Suyono Suyatno, Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan 2013;

Yanuar Bagas Arwansyah, Revitalisasi Peran Budaya Lokal dalam pembelajaran BIPA, 2017;

#### Sumber Internet

(Dunia Perpustakaan, <http://duniaperpustakaan.com/literasi-rendah-ladang-hoax-warga-membaca-berita-tak-sampai-1-menit/>, 14 Februari 2017);

(EsDifferent, <https://id.esdifferent.com/difference-between-hard-power-and-soft-power>, 7 Mei 2018);

(Infokekinian, <https://www.infokekinian.com/pengertian-dan-contoh-kearifan-lokal/>, 1 Maret 2017);

(Kemlu, <http://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>, 7 Mei 2018);

(Kompasiana, Ruli Mustafa, <https://www.kompasiana.com/rulimustafa/5a264835756db50f6829c1a2/memahami-proxy-war>, 5 Desember 2017);

(Kajian Pustaka, <https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-fungsi-dimensi-kearifan-lokal.html>, 17 September 2017);

(Kominfo Dorong Penggunaan Media Sosial untuk Pustakawan, <https://kominfo.go.id>, 12 Oktober 2016);

(Menkominfo: Pemblokiran Situs Jalan Terakhir Melawan Hoax, <http://www.beritasatu.com>, 8 Januari 2017);

(suaraindonesia-news.com, 12 November 2016);

(Trubus, <https://news.trubus.id/post/jumlah-pulau-di-indonesia-17504-bukan-16506-1073>, 21 Agustus 2017);

William S Lind, Understanding Fourth Generation War, Military Review September-October 2004, <http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/milreview/lin>



**BIODATA PENULIS**

Mayjen TNI Arif Rahman, M.A., lahir Bandung, 22 April 1966, Pendidikan Umum : S-2 1997, Pendidikan Militer : Akmil 1988, Seskoad 2003, US Army Command and Staf College 2006, Sesko TNI 2011, KSA Lemhannas 2015, Jabatan : Danyonif 315/GRD Rem 061/SK (2003), Dandim 0606/Kodya Bogor Rem 061/SK Dam III/Slw (2007), Danrindam V/BRW (2012), Danrem 061/SK Dam III/Slw (2013), Waasrena Kasad (2014), Waasrena Panglima TNI (2015), Gubernur Akmil (2016), Pangdam V/Brawijya (2017 s.d. Sekarang)